

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan teknologi menempatkan komunikasi pada garis terdepan dari perubahan sosial. Media berperan dalam membentuk cara manusia berpikir, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Perkembangan politik di internet telah menjadi semakin signifikan seiring dengan peningkatan penggunaan teknologi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, internet dan media sosial telah memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di dunia politik. Salah satu bentuk partisipasi politik di internet yang dilakukan oleh netizen (istilah untuk masyarakat yang beraktivitas di internet) adalah dengan memberikan pendapat dan komentar terhadap berita politik yang disajikan oleh portal web berita di media sosial (Purwantoro, 2021:63).

Salah satu berita yang banyak diperbincangkan oleh netizen adalah berita mengenai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan, yang memberikan pernyataan kontroversial terkait salah satu strategi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu operasi tangkap tangan (OTT). Luhut Binsar Pandjaitan menilai bahwa OTT KPK memberikan citra yang buruk bagi Indonesia dan OTT bukan upaya yang baik untuk melawan korupsi (detik.com, 2022, diakses pada 20 Februari 2023).

Pernyataan ini pertama kali disampaikan Luhut pada 20 Desember 2022. Luhut berpendapat bahwa OTT akan tidak perlu lagi dilakukan jika digitalisasi di banyak lini diterapkan, termasuk E-katalog. Jika digitalisasi diterapkan akan meminimalisir oknum untuk melakukan korupsi, "Kita nggak usah bicara tinggi-

tinggilah. OTT-OTT ini kan nggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget. Tapi kalau kita *digital life*, siapa yang mau melawan kita," kata Luhut. (detik.com, 2022, diakses pada 20 Februari 2023).

Tak berhenti di situ, pada beberapa kesempatan lainnya Luhut juga kembali menyinggung soal OTT KPK. Pada Selasa, 10 Januari 2023, Luhut kembali mengkritik OTT KPK, "Tahun ini 95 persen (digitalisasi). Saya katakan, kalau ekosistem baik, OTT tidak akan perlu lagi ke depan. Karena orang-orang tidak bisa mencuri lagi," ujar Luhut (tempo.co, 2023, diakses pada 20 Februari 2023).

Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2023 Luhut kembali menyinggung mengenai OTT KPK. Menurutnya pemerintah pusat dan daerah harus berani melawan OTT, "Kita harus lawan OTT supaya kita menjadi negara bermartabat. Saya kira kita gak mau negara kita dituduh negara yang tidak memiliki ekosistem yang bagus sehingga terjadi korupsi di Indonesia," ungkap Luhut (cnbcindonesia.com, diakses pada 20 Februari 2023).

Terakhir, pada Juli 2023 Luhut menyampaikan tanggapannya soal OTT KPK, "Ini semua, kerjaan dalam tadi pencegahan. Dan itu menghemat ratusan triliun dan meningkatkan pajak. Itu dilihat, jangan drama-drama bagi yang ditangkap KPK. Kalau kurang jumlahnya ditangkap, berarti nggak sukses. Saya sangat tidak setuju. Itu kampungan menurut saya." Ucap Luhut.

Pernyataan Luhut tersebut menimbulkan kritik dari berbagai pihak, seperti Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Menurut Ma'ruf, OTT masih dibutuhkan untuk menindak kejahatan korupsi sepanjang pendidikan dan pencegahan korupsi belum maksimal. "Kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan, mungkin

akibatnya akan ada penindakan," kata Ma'ruf (kompas.com, 2022, diakses pada 20 Februari 2023).

Selain kritik, terdapat beberapa pihak yang mendukung pernyataan Luhut tersebut, salah satunya Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Ia menilai bahwa tidak ada yang salah dengan pernyataan Luhut. Sebab, menurut dia, pernyataan itu disampaikan Luhut dalam konteks pentingnya penerapan digitalisasi sehingga dapat menutup celah korupsi (kompas.com, 2022, diakses pada 20 Februari 2023).

Buntut dari kontroversi tersebut, pernyataan Luhut mengenai OTT KPK disoroti Presiden Joko Widodo. Pernyataan Luhut itu disinggung dalam rapat istana yang membahas mengenai Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang menurun. Menurut pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang juga hadir dalam rapat tersebut, pernyataan Luhut dinilai Jokowi mempengaruhi IPK Indonesia. Mahfud menyampaikan bahwa Jokowi mengatakan akibat pernyataan Luhut, seakan-akan pemerintah dianggap tak mau ada OTT, "Nanti biar Presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat apa tidak, tetapi memang tadi disampaikan didalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks, seakan-akan pemerintah itu enggak mau OTT," kata Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta pada pada 6 Februari 2023 (cnnindonesia.com, 2023, diakses pada 20 Februari 2023).

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan pernyataan Luhut juga dinilai oleh Ketua KPK Firli Bahuri sangat berpengaruh. Bahkan disebut IPK sempat anjlok saat pernyataan Luhut atas OTT KPK keluar, "Tadi dari hitung-hitungan Ketua KPK memang itu sangat berpengaruh sehingga agak anjlok dalam minggu-

minggu saat itu," jelasnya (detik.com, 2023, diakses pada 20 Februari 2023).

Sebelumnya pada 31 Januari 2023 *Transparency International*, sebuah lembaga koalisi global anti korupsi, merilis survei Indeks Persepsi Korupsi untuk tahun pengukuran 2022. Hasil survei ini menunjukkan IPK Indonesia mendapat skor 34 per 100 dan berada di peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun 4 poin dari tahun sebelumnya, atau merupakan penurunan paling drastis sejak 1995 (ti.or.id, 2023, diakses pada 20 Februari 2023).

Gambar 1.1

Unggahan Instagram @MetroTV mengenai Luhut kritik OTT KPK



Sumber: Instagram @MetroTV, 2023

Atas kontroversi pernyataan Luhut tersebut banyak media yang memberitakannya, termasuk salah satu media portal berita online @MetroTV yang mengunggah berita mengenai kritik Luhut terhadap OTT KPK yang diunggah pada 18 Juli 2023. Unggahan tersebut berjudul “Di Depan Ketua KPK, Luhut Sebut OTT Kampungan”. Unggahan tersebut menuai banyak respon dari

pengguna Instagram. Tercatat terdapat 368 menyukai dan 138 komentar disematkan pengguna Instagram pada unggahan tersebut serta 18 kali dibagikan. Akun Instagram @MetroTV sendiri merupakan salah satu portal berita yang menyajikan konten-konten berita, termasuk politik dengan ulasan dan penyuguhan yang lengkap dan terpercaya. Akun Instagram @MetroTV sendiri telah dipercaya menyajikan berita aktual bagi pengguna Instagram dan telah memiliki *followers* lebih dari 1,5 juta pengguna,

Selain pendapat pro-kontra yang muncul dari berbagai tokoh politik, pernyataan kontroversial Luhutpun menuai respon-respon yang beragam dari para netizen, seperti yang tertera pada kolom komentar unggahan akun Instagram @MetroTV tersebut. Terdapat beberapa akun yang melontarkan kritiknya terhadap pernyataan Luhut, seperti akun bernama @gemit71 yang beranggapan bahwa OTT KPK tetap harus berjalan. Senada dengan itu akun @dedy_sela berpendapat bahwa OTT KPK ada karena banyak pejabat yang melakukan korupsi.

Selain kritik ada pula netizen yang mendukung pernyataan Luhut soal OTT KPK, seperti akun @rudi_saprudin yang menilai bahwa OTT tidak perlu lagi dilakukan selama pejabat negara dengan sumber harta yang tidak terbukti mendapat sanksi.

Di samping kritik dan pembelaan, beberapa netizen menanggapi pernyataan Luhut dengan menaruh kecurigaan. Beberapa netizen menilai bahwa alasan di balik pernyataan Luhut yang mengkritisi OTT KPK adalah karena ketakutannya terhadap OTT KPK. Seperti akun @susi_ubaidillah yang menilai bahwa kritikan Luhut terhadap OTT KPK karena adanya kecurigaan terhadap

Luhut. Bahkan akun @dickystwn_20 menyatakan secara gamblang bahwa Luhut melakukan korupsi.

Gambar 1.2
Screenshot Kolom Komentar Unggahan Instagram @MetroTV



Sumber: Instagram @MetroTV, 2023

Pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang mengkritik OTT KPK menjelma menjadi sebuah kontroversi. Berbagai jenis respon baik pro maupun kontra dilontarkan oleh nama-nama besar dalam politik Indonesia yang dapat dikatakan bahwa mereka merupakan sosok-sosok publik figur. Sehingga, respon yang mereka lontarkan berpotensi besar mempengaruhi pandangan masyarakat.

Lebih lanjut, di samping pendapat diberikan oleh tokoh-tokoh politik, respon terkait pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang mengkritik OTT KPK juga bermunculan dari para netizen dengan sudut pandang yang bermacam-

macam. Menurut hemat peneliti secara garis besar terdapat tiga macam sisi pendapat dari netizen. Pertama, netizen yang mengkritik pernyataan Luhut serta mendukung proses OTT KPK tetap gencar dilaksanakan. Kedua, netizen yang sepakat dengan pernyataan Luhut bahkan beranggapan bahwa OTT KPK tidak perlu dilakukan selama memenuhi syarat tertentu. Ketiga, netizen yang mencurigai Luhut memiliki keterlibatan korupsi atas pernyataannya yang mengkritik OTT KPK. Pendapat para netizen yang dalam hal ini merupakan *followers* Instagram @MetroTV, dapat dipandang sebagai ekspresi sikapnya atas sosok Luhut Sebagai Mekomarves sebagai imbas dari pernyataannya kritik OTT KPK yang beritanya diunggah Media Instagram @MetroTV.

Gambar 1.3
Screenshot Kolom Komentar Unggahan Instagram @MetroTV



Sumber: Instagram @MetroTV, 2023

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Pengaruh Terpaan Media Instagram @MetroTV Terkait Unggahan Berita Mengenai Luhut Kritik OTT KPK Terhadap Sikap *Followers* @MetroTV Pada Luhut Sebagai Menteri.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan variabel terpaan media (X) dilihat pada pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang dikemukakannya di acara peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 pada 20 Desember 2022. Luhut menyatakan bahwa OTT KPK dapat memberikan citra yang buruk bagi Indonesia. Selain itu Luhut juga berpendapat bahwa OTT bukan upaya yang baik untuk melawan korupsi. Pernyataan ini menjadi kontroversi setelah beberapa pihak menyatakan pendapat yang bersifat pro dan kontra.

Wakil Presiden Indonesia, Ma'ruf Amin menilai bahwa apabila proses pendidikan dan juga pencegahan korupsi belum menuai hasil yang baik maka proses OTT KPK masih perlu dijalankan sebagai bentuk tindak kejahatan korupsi.

Pendapat yang bernada membela dilontarkan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD. Ia menilai bahwa maksud pernyataan yang disampaikan oleh Luhut adalah pentingnya penerapan digitalisasi sehingga dapat menutup celah korupsi. Maka pendapat Luhut dinilainya bukan sebagai suatu kesalahan.

Adapun permasalahan variabel sikap (Y) dapat dilihat dari pernyataan kontroversial Luhut soal OTT yang disorot oleh Presiden Joko Widodo. Pernyataan tersebut dinilai memiliki pengaruh dalam penurunan IPK Indonesia. Hal itu diindahkan oleh Ketua KPK Firli Bahuri yang juga menilai pernyataan

Luhut soal OTT KPK memiliki andil dalam skor IPK Indonesia yang menurun. Selain itu respon yang juga beragam muncul dari netizen mengenai pernyataan Luhut soal OTT KPK. Secara garis besar terdapat tiga macam sisi pendapat dari netizen. Pertama, netizen yang mengkritik pernyataan Luhut serta mendukung proses OTT KPK tetap gencar dilaksanakan. Kedua, netizen yang sepakat dengan pernyataan Luhut bahkan beranggapan bahwa OTT KPK tidak perlu dilakukan selama memenuhi syarat tertentu. Ketiga, netizen yang mencurigai Luhut memiliki keterlibatan korupsi atas pernyataannya yang mengkritik OTT KPK.

Merujuk latar belakang masalah yang dipaparkan tersebut di atas, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana terpaan media Instagram @MetroTV terkait Menteri Komarves Luhut kritik OTT KPK?
2. Bagaimana sikap *followers* @MetroTV pada Luhut sebagai menteri?
3. Apakah terdapat pengaruh terpaan media Instagram @MetroTV terkait Menteri Komarves Luhut kritik OTT KPK terhadap sikap *followers* @MetroTV pada Luhut sebagai menteri?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti berkaca pada data masalah variabel terpaan media (X) dan data masalah variabel sikap (Y).

Data masalah variabel terpaan media (X) adalah pernyataan kritikan Luhut Pandjaitan mengenai OTT KPK yang menuai pro dan kontra. Pendapat kontra dilontarkan wakil presiden Indonesia, Ma'ruf Amin yang menilai bahwa proses OTT KPK masih perlu dijalankan. Sedangkan pendapat pro diberikan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD, yang

menilai Luhut bermaksud untuk menekankan urgensi penerapan digitalisasi agar menyulitkan praktik korupsi. Berdasarkan data masalah terpaan media (X) tersebut, tujuan peneliti adalah untuk mengetahui terpaan media Instagram @MetroTV pada tanggal 18 Juli 2023 terkait berita Luhut kritik OTT KPK.

Data masalah variabel sikap (Y) adalah kritik Luhut mengenai OTT KPK yang dinilai oleh Presiden Jokowi dan Ketua KPK Firli Bahuri berpengaruh terhadap skor IPK Indonesia yang menurun. Pernyataan kontroversial Luhutpun menimbulkan respon netizen yang beragam. Secara umum terdapat tiga macam sisi pendapat dari netizen. Pertama, netizen yang mengkritik pernyataan Luhut serta mendukung proses OTT KPK tetap gencar dilaksanakan. Kedua, netizen yang sepatutnya dengan pernyataan Luhut bahkan beranggapan bahwa OTT KPK tidak perlu dilakukan selama memenuhi syarat tertentu. Ketiga, netizen yang mencurigai Luhut terlibat korupsi atas pernyataannya yang mengkritik OTT KPK. Berdasarkan data masalah sikap (Y) tersebut, tujuan peneliti adalah untuk mengetahui sikap *followers* @MetroTV pada Luhut sebagai menteri.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui terpaan media Instagram @MetroTV terkait Menkomarves Luhut kritik OTT KPK.
2. Untuk mengetahui sikap *followers* @MetroTV pada Luhut sebagai menteri.
3. Untuk mengetahui pengaruh terpaan media Instagram @MetroTV terkait Menkomarves Luhut kritik OTT KPK terhadap sikap *followers* @MetroTV pada Luhut sebagai menteri.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Akademis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian dan pembelajaran dalam rangka mengembangkan kajian keilmuan dalam bidang ilmu komunikasi khususnya komunikasi massa serta sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, terkhusus pada penelitian berkaitan dengan terpaan media dan sikap.

1.4.2. Manfaat Praktis

Harapan dari hasil penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi khalayak umum, organisasi atau perusahaan media massa, pengguna media sosial, serta praktisi komunikasi lainnya khususnya berkenaan dengan efek media.

The logo of Universitas Negeri Jakarta is a large, light blue watermark in the background. It features a central torch with a flame, set against a shield-like shape with a fountain pen nib at the bottom. The text "UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA" is written in a semi-circle around the bottom of the shield.

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA